

Abstrak

Rumah Potong Hewan Halal merupakan sebuah sarana pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk titik kritis halal pada pemenuhan sertifikasi halal Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, faktor pengambat tidak terpenuhinya sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, dan akibat hukum belum tersertifikasi halal Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dari hasil wawancara pada data primer dan observasi di Kabupaten Pamekasan, dengan objek penelitian berupa Rumah Potong Hewan Pamekasan dan Waru. Hasil penelitian ini menunjukkan titik kritis pemenuhan standar sertifikasi halal pada Rumah Potong Hewan Pamekasan dan Waru yakni penggunaan kendaraan bak terbuka pengiriman daging, Rumah Potong Hewan Pamekasan mengalami banjir setiap tahunnya dan Rumah Potong Hewan Waru mengalami keretakan dan keberadaan sarang laba-laba. Faktor pengambat dua yakni pemerintah dan keterbatasan anggaran. Akibat hukum Rumah Potong Hewan Pamekasan dan Waru yang belum bersertifikat halal adalah pelaku usaha kecil dan mikro tidak dapat melakukan permohonan sertifikat halal jalur pernyataan mandiri (self-declare) tidak dapat terpenuhi syaratnya sebab mengandung unsur hewani yang tidak berasal dari rumah potong hewan yang tidak ada sertifikat halal.

Kata Kunci: Sertifikat Halal, Rumah Potong Hewan, Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

Abstract

The Halal Slaughterhouse is a community service facility that aims to provide safe, healthy, whole and halal (ASUH) meat to the community. This research aims to determine the form of the halal critical point in fulfilling halal certification for slaughterhouses in Pamekasan District and Waru District, Pamekasan Regency, the factors that influence the failure to fulfill halal certification at slaughterhouses in Pamekasan District and Waru District, Pamekasan Regency, and the legal consequences of not having been certified halal. Slaughterhouses in Pamekasan District and Waru District, Pamekasan Regency. This research uses empirical legal research methods from interviews with primary data and observations in Pamekasan Regency, with the research object being the Pamekasan and Waru Slaughterhouses. The results of this research show that the critical point in fulfilling halal certification standards at the Pamekasan and Waru Slaughterhouses is the use of pickup vehicles for meat delivery, the Pamekasan Slaughterhouse experiences flooding every year and the Waru Slaughterhouse experiences cracks and the presence of cobwebs. The two limiting factors are the government and budget limitations. The legal consequence of Pamekasan and Waru Slaughterhouses not being halal certified is that small and micro business actors cannot apply for a halal certificate via the self-declaration route and cannot fulfill the requirements because they contain animal elements that do not come from non-existent slaughterhouses. halal certificate.

Keywords: Halal Certificate, Slaughterhouse, Small and Micro Enterprises